

BAB I

PENDAHULUAN

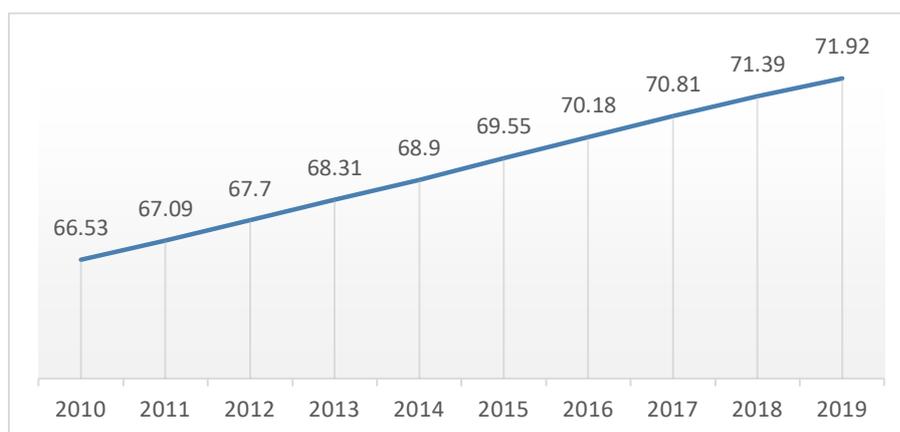
1.1 Latar Belakang Masalah

Beberapa upaya dapat dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah rancangan pembangunan sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan pemerintah bersama dengan masyarakat untuk bergerak mencapai kehidupan yang lebih baik. Pendapatan per kapita dinilai gagal menjadi indikator guna mengukur pembangunan ekonomi, karena dianggap kurang akurat. Lalu Morris (1979) membangun *the Physical Quality of Life Index* (PQLI). Sedangkan Mahbub ul Haq (1996), seorang penasihat khusus UNDP, menetapkan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai sebuah indikator untuk mengukur kesejahteraan dengan 4 elemen utama pembangunan manusia, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equality*), keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*). Indeks ini memprioritaskan hal-hal sensitif dan mendetail yang dianggap lebih efektif dan berguna daripada hanya sekedar menggunakan pendapatan per kapita sebagai alat ukur kesejahteraan. Hingga saat ini, negara-negara di dunia menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat ukur kesejahteraan masyarakatnya dan berlanjut setiap tahun (Setiawan & Hakim, 2013).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini memegang tiga komponen dasar yang dapat mencerminkan upaya pembangunan manusia di suatu daerah yang meliputi usia panjang yang didukung dengan harapan hidup rata-rata, akses pada pengetahuan diukur dari persentase orang dewasa melek huruf dan tingkat partisipasi sekolah, serta standar hidup yang layak berdasarkan pendapatan per kapita didukung dengan paritas daya beli masyarakat (Nurzaman, 2010). Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan pada komponen-komponen penting tersebut, karena beberapa indikator dianggap sudah tidak tepat untuk digunakan.

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (2014), pada tahun 2010 UNDP memperkenalkan model perhitungan IPM yang baru. Adapun komponen yang diganti adalah angka melek huruf, karena dinilai tidak relevan dalam

mengukur pendidikan secara utuh dan tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, pada sebagian besar daerah, angka melek huruf dinilai sudah tinggi, hal tersebut menjadikan angka melek huruf tidak dapat digunakan sebagai standar tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Kemudian indikator PDB per kapita diganti dengan PNB per kapita, karena dianggap lebih dapat menggambarkan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Selama masa perubahan tersebut, Indonesia melakukan penyesuaian terhadap metode baru, terlebih pada indikator PNB karena data PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Oleh sebab itu, Indonesia baru secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan model baru pada tahun 2014 untuk menjawab tantangan masyarakat internasional (Yektiningsih, 2018).



Gambar 1. 1
IPM Indonesia Tahun 2010-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020) (data diolah)

Dalam Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa angka IPM Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2016, status pembangunan Indonesia berubah menjadi “tinggi”, setelah sebelumnya berstatus “sedang” dalam kurun waktu 5 tahun lamanya, yakni pada 2010-2015. Selain itu, angka IPM Indonesia tahun 2016 pun mengalami peningkatan sebesar 0,63 poin atau 0,91 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan IPM Indonesia pada level nasional pun diiringi dengan meningkatnya IPM Indonesia pada level provinsi. Terdapat empat provinsi yang berubah status IPMnya dari “sedang” menjadi “tinggi”, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Barat (Badan Pusat Statistik, 2017).

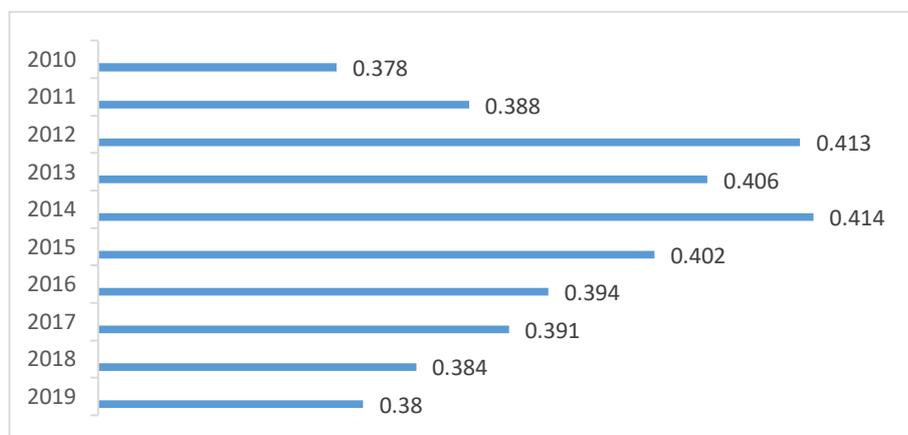
Tahun 2017, tingkat IPM Indonesia berada di atas rata-rata IPM negara berkembang. Didukung dengan Angka Harapan Hidup (AHH) Indonesia yang 0,3 lebih besar dibanding nilai rata-rata berkembang. Selain itu, Angka Harapan Sekolah (AHS) yang 0,8 lebih besar dan rata-rata lama sekolah 1,3 lebih besar dibanding rata-rata negara berkembang (Amalia, dkk, 2019). *United Nations Development Programme* (UNDP) mengkategorikan tingkatan IPM menjadi pembangunan sangat tinggi, menengah, dan rendah. Pengkategorian ini digunakan untuk menilai pembangunan manusia setiap negara di dunia, serta mengetahui daya saingnya secara internasional, mulai dari level tertinggi hingga terendah (Salam & Rosdiana, 2015).

Indonesia masuk ke dalam kategori pembangunan tinggi, dikarenakan telah berhasil melebihi batas kategori pembangunan manusia tinggi yakni 0,7-0,79. Walaupun setiap tahunnya mengalami peningkatan, IPM Indonesia masih tertinggal dibanding negara lainnya, bahkan negara ASEAN sekalipun. Pada peringkat dunia, Indonesia menempati urutan ke 113 dari 188 negara. Sedangkan di tingkat Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi ke 6 dari 10 negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Indonesia masih sangat rendah serta belum mampu bersaing dengan negara lain.

Seorang ekonom UNDP Indonesia bernama Rima Prama Artha (2019) mengatakan Indonesia sudah berada pada perubahan yang signifikan, hanya saja perlu melakukan pengoptimalan pada berbagai aspek, salah satunya yaitu ketimpangan. Indonesia kehilangan 17,4 persen nilai IPM karena masalah ketimpangan yang terbilang masih cukup besar (UNDP Indonesia, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa perlunya tindakan dari pemerintah untuk mengatasi masalah ketimpangan ini, sehingga dapat berpengaruh pada meningkatnya IPM Indonesia.

Ibrahim (2017) menjelaskan bahwa kemampuan pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan pembangunan dan mengatasi masalah ketimpangan menjadi salah satu indikator keberhasilan di setiap rezim pemerintahan. Distribusi pendapatan yang merata menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan ekonomi (Yusuf, 2013). Apabila angka ketimpangan pada suatu daerah masih tinggi, maka hal tersebut akan menghambat laju tingkat pembangunan manusia daerah tersebut, begitupun sebaliknya. Menurut Rosyidi (2011) ketimpangan pada distribusi

pendapatan mengakibatkan semakin lebarnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Saat ini, Rasio Gini atau Indeks Gini digunakan sebagai indikator standar untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan.



Gambar 1. 2
Rasio Gini Indonesia Tahun 2010-2019
Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) (data diolah)

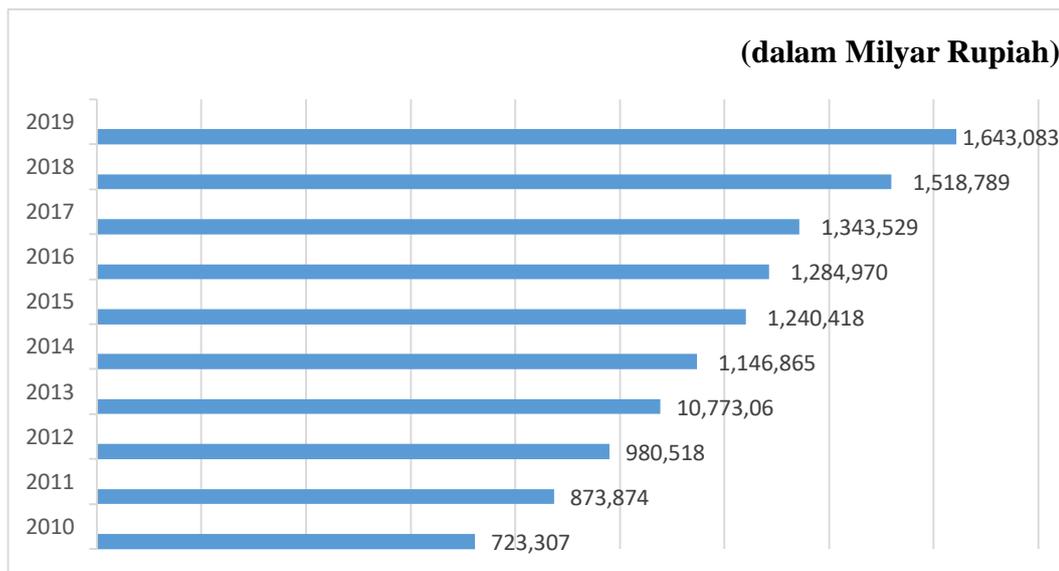
Berdasarkan pada Gambar 1.2, dapat diketahui bahwa angka rasio gini di Indonesia mengalami fluktuasi pada periode 2010-2019. Selama satu dekade tersebut, angka tertinggi dicapai pada tahun 2014. Hal ini salah satunya disebabkan oleh orang miskin telah mengalami peningkatan pendapatan, tetapi peningkatan tersebut jauh lebih lambat daripada peningkatan pendapatan yang dialami oleh kelas menengah. Sehingga, kesenjangan atau *gap* diantara keduanya masih tetap terjadi. Kemudian, angka rasio gini mulai berhasil ditekan terutama pada tahun 2016. Adapun salah satu daerah yang berkontribusi terhadap penurunan angka rasio gini adalah Provinsi Bangka Belitung. Pada daerah tersebut, pemerintahnya memprioritaskan memajukan UMKM daripada memperluas jaringan waralaba. Selain itu, akulturasi budaya di sana cukup terbilang baik, sehingga tidak menyebabkan kesenjangan pendapatan semakin tinggi. Dengan kata lain, penduduk di sana sudah saling membaaur (Megawandi, 2018).

Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh lembaga keuangan *Credit Suisse* (2017), bahwa tingginya ketimpangan di Indonesia tahun 2017 disebabkan akumulasi segelintir orang yang menguasai kekayaan nasional. Widyanita (2017) menjelaskan bahwa 1 persen orang terkaya orang Indonesia, menikmati 49,3 persen kekayaan nasional. Pernyataan ini didukung berdasarkan

dua dekade terakhir, ketimpangan ekonomi di Indonesia melesat lebih cepat dibanding negara Asia Tenggara lainnya. Empat orang terkaya menguasai kekayaan lebih dari 100 juta penduduk termiskin di Indonesia. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah milioner di Indonesia. Dari yang sebelumnya hanya satu orang pada tahun 2000, menjadi 20 orang pada tahun 2016 (OXFAM, 2017). Hal tersebut mencerminkan distribusi pendapatan yang belum merata untuk orang miskin (Rosyidi, 2011).

Distribusi pendapatan turut berkontribusi dalam peningkatan pembangunan manusia. Karena akan banyak pihak yang mengalami keterbatasan keuangan, apabila terjadi ketimpangan pendapatan atau distribusi pendapatan yang tidak merata. Lumbantoruan dan Hidayat (2014) menjelaskan dampak dari kejadian tersebut adalah masyarakat akan mengurangi pengeluarannya baik untuk pendidikan maupun kesehatan. Akibatnya, konsumsi mereka hanya untuk sesuatu yang kurang bergizi dan bernutrisi. Oleh karena itu, perlu adanya proses distribusi secara komersial maupun sosial. Tujuannya adalah agar memenuhi kebutuhan setiap individu dan meningkatkan kesejahteraan atau *human falah* (Kalsum, 2018). Dengan demikian, perlunya memperbaiki distribusi pendapatan guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin agar mereka mampu untuk memperbaiki kualitas kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Pajak menjadi salah satu kebijakan yang membantu pemerintah dalam upaya rancangan pembangunan di Indonesia. Bahkan, sebagian besar penerimaan negara didominasi oleh penerimaan pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani (2017) mengatakan bahwa saat ini sumber penerimaan utama negara yaitu pajak yang kemudian digunakan untuk membiayai proses pembangunan. Semakin banyak penerimaan pajak, maka akan selaras dengan banyaknya fasilitas yang dibangun. Sehingga terjadi perbaikan konektivitas antar wilayah yang akan menghasilkan *trickle down effect* melalui perluasan pasar dan kesempatan kerja. Vjiesandiran dan Selvarasa (2018) pun mengatakan hal yang serupa, bahwa baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, pendapatan pajak berpengaruh terhadap pembangunan manusia.



Gambar 1. 3
Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2010-2019
 Sumber: Badan Pusat Statistik (2020) (data diolah)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2018), penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Periode tahun 2007-2016, pajak penghasilan berkontribusi besar sebagai sumber penerimaan pajak dalam negeri dengan rata-rata kontribusi 51,57% dari total penerimaan pajak. Lalu, pada Laporan Tahunan Kementerian Keuangan 2018 mencatat bahwa setiap tahunnya, penerimaan perpajakan terus mengalami peningkatan. Realisasi pendapatan negara telah melampaui estimasi yang direncanakan. Adapun sumber pendapatan negara itu disumbang oleh penerimaan pajak sebesar 93,86% dari target yang telah ditetapkan (Kementerian Keuangan, 2018).

Penerapan tarif pajak penghasilan progresif di Indonesia mendasari masyarakat yang berkemampuan lebih harus menanggung beban yang lebih besar untuk membayar pajak dibandingkan dengan masyarakat yang berpendapatan minim. Fahmi (2019) menjelaskan bahwa kebijakan tarif pajak penghasilan progresif ini merupakan jalan untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun reformasi perpajakan juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan yang akan digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat yang diukur salah satunya melalui IPM (Saragih, 2018).

Di Indonesia, saat ini peran zakat semakin besar sebagai salah satu instrumen pembangunan manusia. Hal tersebut didukung dengan tiga dimensi pokok yang dimiliki zakat seperti yang dijelaskan oleh Beik (2010) yaitu meliputi dimensi spiritual personal, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi. Pada dimensi ekonomi, zakat mempunyai dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan mekanisme *sharing* dalam perekonomian. Apabila ditelaah kembali, ketiga dimensi zakat ini memiliki kesamaan dengan tiga komponen pembangunan manusia yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (Murniati & Beik, 2014). Menurut Kahf (1995), penumpukan harta pada suatu kelompok saja sangatlah ditentang oleh Al-Qur'an. Karenanya, zakat dinilai cenderung berperan sebagai sistem distribusi harta yang *egaliter*. Sehingga memungkinkan terjadinya perputaran dan peredaran harta kepada seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurzaman (2010) yang menguji tentang pengaruh zakat terhadap nilai IPM dan komponen-komponennya, menunjukkan memang hasil estimasi nilai IPM tersebut sebesar 69,42 dan masih di bawah rata-rata IPM Jakarta (77,36) maupun nasional (71,76). Tetapi, zakat mempengaruhi nilai IPM secara tidak langsung dan memberikan efek perubahan pada alokasi pendapatan dan konsumsi untuk tujuan yang produktif. Meskipun realisasinya masih di bawah satu persen dari proyeksi yang ditargetkan, namun pertumbuhan zakat terus menunjukkan pertumbuhan secara signifikan (Murniati & Beik, 2014). Berdasarkan catatan BAZNAS (2013) terjadi peningkatan pada dana zakat yang berhasil dihimpun pada tahun 2012 yakni mencapai Rp2.2 triliun. Angka yang lebih besar daripada tahun sebelumnya sebesar Rp1.7 triliun dan tahun 2010 sebesar Rp1.5 triliun. Apabila dibandingkan dengan dana untuk menanggulangi kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat setiap tahun yaitu sekitar Rp70 triliun, maka sebanyak 1,7 juta *mustahik*, yang setara dengan enam persen warga miskin dapat terbantu oleh dana zakat. Dengan begitu, kesenjangan antara si kaya dan miskin dapat ditekan dan mampu mendorong meningkatnya pembangunan manusia di Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan laporan pada Statistik Zakat Nasional menunjukkan bahwa setiap tahun selalu terjadi peningkatan pada tren pengumpulan zakat dalam kurun waktu 2002-2018 (PPID BAZNAS, 2019). Kemudian pada tahun 2019, dana

zakat yang berhasil dikumpulkan adalah sebesar 10,166.12 miliar rupiah. Jumlah tersebut diproyeksikan akan bertumbuh menjadi >13,215.96 miliar rupiah pada tahun 2020. Terlebih apabila kebijakan *quick wins* zakat MEKSI sudah diimplementasikan, maka akan terus ada peningkatan pada pengumpulan zakat secara nasional (Outlook Zakat Indonesia, 2017). Hal tersebut dapat mendorong peran zakat terhadap rancangan pembangunan akan semakin besar lagi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul penelitian skripsi ini adalah **“Pembangunan Manusia: Analisa Ketimpangan Ekonomi, Pajak, dan Zakat di Indonesia Tahun 2012-2016”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Pada penelitian ini, identifikasi permasalahannya adalah meskipun sejak tahun 2016 hingga saat ini Indonesia telah masuk dalam kategori negara dengan angka IPM yang tinggi, tetapi nilai IPM Indonesia itu dirasa masih tertinggal dan jauh berada pada peringkat ke-113 dunia. Sedangkan untuk tingkat ASEAN, Indonesia masih menempati posisi ke 6 dari 10 negara. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki kualitas pembangunan manusia yang mampu bersaing dengan negara lain. Nilai IPM yang masih tertinggal ini disebabkan oleh masih banyaknya indikator yang belum dioptimalkan (Artha, 2019). Sementara pembangunan manusia itu harus terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, sehingga dapat membawa kesejahteraan ke taraf yang lebih baik lagi (Rustiadi, dkk, 2011).

Angka ketimpangan yang cukup tinggi menyebabkan Indonesia kehilangan nilai IPM sebesar 17,4 persen (UNDP Indonesia, 2019). Oleh karena itu, kemampuan pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan pembangunan dan mengatasi masalah ketimpangan menjadi salah satu indikator keberhasilan di setiap rezim pemerintahan (Ibrahim, 2017). Pada peringkat dunia, Indonesia memasuki urutan ke- 4 dalam daftar negara dengan angka kesenjangan tertinggi (Credit Suisse, 2017). Sebanyak 49,3 persen kekayaan nasional di Indonesia masih dinikmati oleh hanya 1 persen saja warga negaranya (Widyanita, 2017). Lebih jelasnya lagi organisasi OXFAM (2017) dalam laporannya mencatat bahwa selama dua dekade terakhir ini, Empat orang terkaya menguasai kekayaan lebih dari 100 juta penduduk termiskin di Indonesia. Dengan demikian, perlunya memperbaiki

distribusi pendapatan guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Karena, distribusi pendapatan turut berkontribusi dalam pembangunan manusia di sebuah negara.

Berdasarkan pemaparan masalah tersebut, maka penulis menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum pembangunan manusia di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh ketimpangan ekonomi terhadap pembangunan manusia di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak terhadap pembangunan manusia di Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh penghimpunan ZIS terhadap pembangunan manusia di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang serta pertanyaan penelitian yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang gambaran umum pembangunan manusia di Indonesia. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengetahui pengaruh dari:

1. Ketimpangan ekonomi terhadap pembangunan manusia di Indonesia.
2. Penerimaan pajak terhadap pembangunan manusia di Indonesia.
3. Penghimpunan ZIS terhadap pembangunan manusia di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat berguna secara teoritis maupun praktis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa tambahan khasanah keilmuan dalam di bidang ekonomi dan keuangan Islam melalui variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rasio gini, penerimaan pajak, dan penghimpunan ZIS. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk studi selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun saran bagi para *stakeholder* sebagai tolok ukur dalam penetapan

kebijakan mengenai pengaruh ketimpangan ekonomi, pajak, dan zakat terhadap pembangunan manusia.